

**PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD LOCAL GOVERNANCE*
DALAM PEMERINTAHAN NAGARI
(STUDI PARTISIPASI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS
DALAM PEMBANGUNAN NAGARI SUNGAI PUA
KABUPATEN AGAM)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

**APRATO
BP. 06193023**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

ABSTRAK

Aprato (06193023) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, 2011. Pembimbing I Drs. Syaiful, M.Si dan pembimbing II Tengku Rika Valentina, S.IP, MA. Judul Skripsi Pelaksanaan Prinsip *Good Local Governance* dalam Pemerintahan Nagari (Studi Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pembangunan Nagari Sungai Pua). 89 Hal, 8 Buku, 5 Laporan Penelitian, dan 5 Artikel Internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan prinsip *good local governance* khususnya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan Nagari Sungai Pua. Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum nagari. Dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan prinsip *good local governance* khususnya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan Nagari Sungai Pua. Teori yang peneliti gunakan adalah teori partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dengan teknik pemilihan informan secara *Purposive Sampling*. Unit analisis yang digunakan adalah unit analisis lembaga, menggunakan jenis data primer dan data sekunder dengan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data serta analisis data dengan menggunakan interpretasi etik dan interpretasi emik.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam pembangunan Nagari Sungai Pua. Masyarakat diikutsertakan dalam mengusulkan program-program pembangunan nagari. Swadaya masyarakat sangat tinggi dalam pembangunan nagari. Swadaya tersebut berbentuk sumbangan dana, tenaga, waktu, dan pikiran untuk pembangunan nagari. Pelaksanaan program-program pembangunan belum transparan. Belum adanya informasi pembangunan yang terbuka kepada masyarakat. Secara proses, prinsip akuntabilitas sudah terlaksana dalam pembangunan Nagari Sungai Pua. Tahapan-tahapan kebijakan pembangunan nagari telah dilaksanakan. Tetapi Pemerintah Nagari Sungai pua masih memprioritaskan program-program pembangunan yang diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam dari pada program-program pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan program-program pembangunan di Nagari Sungai Pua belum maksimal.

Kata kunci : *Good Local Governance*, Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, dan Pemerintahan Nagari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan bergulirnya era reformasi, maka kajian otonomi daerah menjadi kajian yang sangat populer dibicarakan. Dalam otonomi daerah ini, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Otonomi daerah dibicarakan oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan politisi. Keputusan politik pemerintah menetapkan kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijadikan acuan dan pedoman umum bagi daerah dalam mengurus dan mengelola potensi daerahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberi kesempatan pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan daerah dalam bentuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, kesejahteraan, prakarsa, kreativitas, peran serta masyarakat, menumbuhkembangkan demokrasi, keadilan, persatuan dan kesatuan nasional dengan mengingat asal-usul suatu daerah, kemajemukan dan karakteristik, serta potensi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Dalam hal ini berarti pelaksanaan otonomi daerah akan lebih bermanfaat kalau dikelola oleh pemerintah yang memiliki kemampuan baik dalam arti manajerial maupun moral serta etika pemerintahan yang inovatif dan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

demokratis, dan semua itu mengacu pada konsep yang terdapat dalam prinsip-prinsip *good governance*.

Good governance meliputi tiga domain yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor informal lain di pasar yang berbeda dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kewajiban sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri. Masyarakat terdiri dari individual maupun kelompok baik yang terorganisasi maupun tidak yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Ketiga domain ini saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Sektor swasta memainkan peran penting dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar. Pendekatan ini berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa berjalan dengan baik, sehingga dapat menciptakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, politik, dan ekonomi, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, politik, dan ekonomi.²

Secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman : (1) nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat

² Enceng, Liestyodono BI, Purwaningdyah MW, "Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan *Good Governance*", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol. 2, No. 1, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Negara, 2008, hlm. 38.

berbentuk sumbangan dana, tenaga, waktu, dan pikiran. Jumlah swadaya masyarakat sangat tinggi dalam pembangunan Nagari Sungai Pua. Untuk mengatur dan mengelola swadaya masyarakat dalam bentuk sumbangan dana maka Pemerintah Nagari Sungai Pua telah mengeluarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Iuran Nagari Sungai Pua. Dengan Peraturan tersebut maka iuran masyarakat Nagari Sungai Pua telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah nagari untuk kepentingan pembangunan nagari.

Perantau Sungai Pua juga memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan Nagari Sungai Pua. Para perantau Nagari Sungai Pua yang terorganisir dalam Ikatan Keluarga Sungai Pua (IKSP) memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pembangunan nagari. Kontribusi para perantau tersebut berbentuk sumbangan dana dan ide-ide pemikiran untuk kemajuan Nagari Sungai Pua.

Selain berbentuk sumbangan dana, partisipasi masyarakat Nagari Sungai Pua dalam pembangunan nagari dapat juga berbentuk sumbangan tenaga dan waktu untuk bergotong-royong. Masyarakat Nagari Sungai Pua dilibatkan langsung dengan bergotong-royong membangun nagari. Pembangunan nagari yang tidak membutuhkan *skill* tinggi dikerjakan oleh masyarakat dengan cara bergotong-royong. Untuk pembangunan nagari yang membutuhkan *skill* tinggi baru dilaksanakan oleh tenaga ahli.

Prinsip transparansi belum terlaksana dalam pembangunan Nagari Sungai Pua. Belum ada keterbukaan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang program-program dan penggunaan anggaran pembangunan nagari. Masyarakat Nagari Sungai Pua belum mendapatkan informasi program dan penggunaan anggaran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abbas, Anurlis. 1982. *Monografi Nagari Sungai Pua*. Sungai Pua.
- Cahyono, Heru. 2005. *Konflik Elit Politik Pedesaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Murad. 1969. *Selayang Pandang Perkembangan Kampung Halaman Sungai Pua*. Jakarta: Yayasan Sungai Pua.
- Prasetyo, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syamsi, Ibnu. 1987. *Ensiklopedi Umum dan Pembangunan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Jurnal Penelitian

- Ardian Firmas, Muhamad. 2007. "Implementasi Good Governance Melalui Reformasi Sistem Kepegawaian: Belajar dari Pengalaman China". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol. 1, No. 2.
- Enceng, Liestyodono BI, dan Purwaningdyah MW. 2008. "Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol. 2, No. 1.
- Kurniasih, Dewi. 2005. "Model Skala Prioritas Pembangunan Kota Bandung Berbasis Good Governance". *Jurnal Penelitian Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2.
- Rosyidi, Bakaruddin. 2003. "Good Governance dan Capacity Building dalam Membangun Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat". *Jurnal Analisa Politik*, Vol. 1, No. 5.